

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap Negara juga, menuntut daya saing disetiap pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah, hal ini sesuai dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola

sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 yakni: "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan, atau transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Abdul Halim 2007 : 77). Untuk dapat menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah mengacu pada peraturan yang berlaku.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern yang lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah. Sedangkan setiap pemerintah daerah harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya.

Pemerintahan Kota Gorontalo merupakan salah satu pemerintah di Provinsi Gorontalo yang diwajibkan melaksanakan sistem akuntansi Pemerintahan daerah pada tingkat SKPD maupun SKPKD untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi. Apabila sistem dilaksanakan dengan baik, maka laporan keuangan dapat dihasilkan dan dilaksanakan dengan baik, mudah, akurat, dan tepat waktu.

Pada praktek pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan Provinsi Gorontalo spesifik di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (DINKES) masih

mengalami berbagai kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan sistem akuntansi tersebut. Yaitu dibuktikan tidak disajikannya laporan keuangan dengan tepat waktu, dan setiap daerah mengharuskan untuk dapat melaksanakan Sistem Akuntansi yang Handal, dan tepat waktu pada penyajian laporan, kurangnya tenaga yang menguasai tentang sistem akuntansi atau dalam akuntansi, serta pengalokasian anggaran yang bersumber APBD masih rendah belum mencapai 10% dari total APBD sesuai amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Selain itu juga pada tahun 2004 ditemukan penyalahgunaan dana yang berhubungan dengan pengadaan alat kesehatan yang merugikan Negara sebesar Rp. 600 juta dalam proyek senilai Rp. 2,7 Milyar, dan pada tahun 2009 juga berhubungan dengan pengadaan alat kesehatan sejumlah Rp. 531 juta dalam proyek Rp. 4,7 Milyar.

Berdasarkan masalah-masalah yang ada pada DINKES Provinsi Gorontalo, hal ini membuktikan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah masih belum optimal dalam penerapannya. Sedangkan sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dimana pemerintah daerah tersebut harus bisa bertanggungjawab, efisien, efektif, dan partisipatif.

Seiring dengan masalah yang terdapat pada DINKES Provinsi Gorontalo, dapat dilihat hal ini juga berkaitan dengan Akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah daerah tersebut. Dalam LAKIP DINKES 2012 dijelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas kinerja juga menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan di ambil.

Chabib Sholeh dan Suropto (2011:3) juga menjelaskan Kinerja Pemerintah Daerah itu sendiri dapat diartikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Daerah

Peran kinerja pemerintah daerah itu sendiri sangat penting Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkatan pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif kebijakan operasional yang telah diambil. Jadi pengukuran Sistem Akuntansi Pemerintah daerah ini bisa memperlihatkan baik dan buruknya Kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga, semua masalah menyangkut kinerja yang terjadi pada Kantor DINKES Provinsi Gorontalo akan berdampak juga pada akuntabilitas kinerja. Dengan

adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Tetapi, hal yang terjadi di lapangan, akuntabilitas kinerja pemerintah belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan dari laporan keuangan yang harusnya dijadikan untuk pengambilan keputusan periode yang akan datang tidak digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Selain itu masih terdapat sumber daya manusia (tenaga akuntan) yang dalam pembuatan laporan keuangan masih mengalami kesulitan dikarenakan mereka bukan berpependidikan dari Akuntansi sehingga kurang memahami tentang akuntansi. Jadi, pada saat pembuatan laporan seringkali terdapat kesulitan yang mengakibatkan kepala bagian akuntansi yang harus turun langsung dalam mengerjakan laporan keuangan tersebut, masih mengalami keterlambatan dalam pembuatan pertanggungjawaban dana yang digunakan, pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah jadwalnya tidak sesuai rencana menghambat proses pencairan dana, kurang tepatnya penyusunan program dengan rencana penarikan keuangan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana, serta masih adanya ketidakberhasilan dalam mencapai target dalam bidang kesehatan. Dari masalah tersebut terlihat kinerja dalam DINKES Provinsi Gorontalo belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini penulis wujudkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Sapd), Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah di DINKES belum optimal sehingga penerapannya masih Lemah dan mengalami kesulitan yaitu dalam penyajian laporan masih sering terlambat, masih adanya masalah yang berhubungan dengan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan UU Kesehatan, serta masih adanya temuan BPK yang berhubungan dengan penerapan sistem akuntansi.
2. Kinerja Pemerintah masih belum optimal, ini bisa dilihat dari belum efektifnya penerapan Sistem Pemerintah Daerah, sehingga pencapaian tujuan, maupun sasaran belum bisa optimal atau tepat pada waktunya

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh penerapan Sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian, yaitu Untuk mengetahui Pengaruh penerapan Sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis :

Menjadi tambahan Informasi tentang Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan kinerja pemerintah daerah di Daerah Gorontalo.

2. Bagi Pembaca :

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa ini lebih baik untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.

### 3. Bagi Instansi pemerintah Daerah :

Bagi instansi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber pengetahuan dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi itu sendiri.

#### **1.5.2 Kegunaan Teoritis**

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi dunia akuntansi khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya.

##### 1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan kinerja pemerintah daerah di Daerah Gorontalo.
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.